

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti yang telah tertulis pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa BUMDes Jaya Abadi Desa Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah berhasil menjalankan pemberdayaan Masyarakat dengan baik. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Bina Manusia, Pada BUMDes Jaya Abadi dilaksanakan melalui berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan membatik Balongkemisan, Hasta Karya, dan pembinaan kelompok PKK. Program ini menunjukkan upaya BUMDes dalam meningkatkan kompetensi dan kemandirian masyarakat. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal (sekitar 60%) dan juga belum optimalnya penyampaian informasi program, sehingga sebagian masyarakat menganggap kegiatan tersebut merupakan program Pemerintah Desa, bukan BUMDes. Secara administratif, kegiatan telah disusun secara terstruktur melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, meskipun masih menghadapi kendala berupa dokumentasi yang belum lengkap dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola.
2. Bina Usaha, Mekanisme kerja seperti rapat evaluasi, prosedur pembentukan unit usaha, pencatatan keuangan yang baku, serta pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa sertifikat merek dan label produk

UMKM masyarakat desa mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha. Namun, kapasitas SDM pengelola masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh staf memahami standar administrasi dan pembagian tugas secara merata. Secara keseluruhan, pengelolaan Bina Usaha telah berjalan dengan baik, didukung oleh koordinasi yang cukup kuat dan sistem administrasi yang relatif tertata. Meski demikian, peningkatan kompetensi SDM serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan masih diperlukan agar pengembangan usaha desa dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Bina Lingkungan, program telah dijalankan melalui inisiatif pengelolaan sampah, khususnya pembentukan Bank Sampah yang dipelopori oleh BUMDes Jaya Abadi dan kemudian berkembang di setiap dusun. Seiring waktu, bank sampah tersebut telah berjalan secara mandiri di masing-masing dusun. Namun, efektivitas program bina lingkungan masih terbatas akibat rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan keterbatasan sarana pendukung, sehingga pengelolaan sampah belum sepenuhnya optimal. Secara kelembagaan, praktik ramah lingkungan sudah mulai terbentuk, tetapi belum didukung oleh regulasi khusus maupun sistem evaluasi yang terstruktur. Secara keseluruhan, program bina lingkungan telah memberikan dampak positif bagi desa, namun masih memerlukan penguatan regulasi, standar evaluasi, serta strategi pendampingan yang lebih sistematis agar keberlanjutan lingkungan desa dapat terjaga secara optimal.

4. Bina Lembaga, sistem administrasi dan koordinasi internal berjalan terstruktur melalui pembagian tugas, rapat rutin, dan evaluasi berkala, sehingga mendukung transparansi dan stabilitas operasional. Namun, BUMDes masih menghadapi tantangan seperti perlunya penguatan modal, peningkatan sinergi dengan pihak eksternal, serta transparansi laporan yang lebih terbuka kepada masyarakat. Digitalisasi administrasi dan fleksibilitas prosedur juga perlu ditingkatkan agar tata kelola lebih adaptif. Partisipasi masyarakat memberikan manfaat terutama bagi pelaku UMKM, meski dampak ekonomi langsung belum besar. Secara keseluruhan, tata kelola dan koordinasi BUMDes sudah baik, tetapi peningkatan kapasitas SDM, penguatan jejaring, dan pengembangan mekanisme partisipasi masih diperlukan untuk mencapai pengelolaan lembaga yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, pembahasan dan Kesimpulan yang ada terdapat pada bab sebelumnya. Penulis memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk BUMDes Jaya Abadi Desa Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yaitu:

1. Perbaikan mekanisme sosialisasi program secara lebih terarah dan konsisten, serta mendorong keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan kegiatan. Selain itu, dokumentasi kegiatan yang belum lengkap dan keterbatasan sumber daya manusia pengelola perlu dibenahi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perlu dilakukan melalui pelatihan administrasi, manajemen usaha, serta pembagian tugas yang lebih jelas agar seluruh staf memiliki pemahaman dan kemampuan yang merata. Pendampingan terkait legalitas usaha, pemasaran, dan pengembangan produk juga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar unit usaha desa dapat berkembang secara mandiri dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
3. Penguatan peran pembinaan dan pendampingan terhadap Bank Sampah di setiap dusun, meskipun pengelolaannya telah berjalan secara mandiri. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi atau pedoman teknis pengelolaan lingkungan yang jelas, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta pelaksanaan evaluasi program secara berkala. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat perlu terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi lingkungan agar partisipasi warga dalam pengelolaan sampah semakin meningkat dan keberlanjutan lingkungan desa dapat terjaga secara optimal.
4. Penguatan jejaring kerja sama dengan pihak eksternal serta meningkatkan keterbukaan informasi melalui penyampaian laporan keuangan dan kinerja secara rutin. Selain itu, digitalisasi administrasi dan mekanisme partisipasi masyarakat yang masih terbatas perlu ditingkatkan agar tata kelola BUMDes menjadi lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.